

NEO-FUNDAMENTALISME*

Oliver Roy

Pengarang The Failure of Political Islam, Harvard University Press (1994), and The New Central Asia, the Creation of Nations, Tauris, Londres, 2000.

Lebih dari dua puluh tahun setelah revolusi Islam di Iran, gelombang radikalisme Islam yang banyak berkembang di Timur Tengah sejak tahun 1970-an berjalan ke arah yang berbeda. Gerakan Islam yang dominan bergerak dari perjuangan ke arah komunitas Islam supra-nasional menuju semacam nasionalisme Islam: mereka ingin diakui sepenuhnya sebagai aktor yang *legitimate*

dalam wilayah politik domestik, dan secara umum mereka tidak lagi memperjuangkan agenda supra-nasional yang sebelumnya menjadi bagian ideologi mereka.

Di sisi lain, kebijakan re-Islamisasi konservatif yang diimplementasikan oleh beberapa negara –bahkan oleh negara sekuler sekalipun– untuk mengurangi oposisi kelompok Islam dan untuk mendapatkan kembali legitimasi religius mengalami kemunduran. Kebijakan ini telah melahirkan gerakan fundamentalis baru yang secara ideologis konservatif tetapi secara politik radikal.

Gerakan neo-fundamentalisme ini secara umum tidak banyak berkaitan dengan strategi dan kebijakan negara. Pada tahap awal, gerakan ini tidak terlalu politis dibanding gerakan Islam – tidak banyak peduli terhadap pendefinisian negara Islam yang benar tetapi lebih memperhatikan implementasi syariat Islam.

Meskipun gerakan ini pada dasarnya muncul secara sosio-kultural, gerakan ini telah melahirkan ekspresi ekstrim yang tersebar dalam jaringan yang cukup terbuka, seperti organisasi al-Qaidah yang diketuai oleh Osama Bin Laden, yang bertanggungjawab terhadap penghancuran

* Diterjemahkan oleh Nurul Azkiyah dari artikel "Neo-Fundamentalism" yang dimuat dalam *Social Science Research Council On Line*.

curan WTC pada tanggal 11 September 2001. Konsekuensinya adalah terorisme Islam Internasional telah berganti dari tindakan negara atau tindakan untuk melawan target yang ada dalam negara itu sendiri menjadi tindakan supranasional yang tanpa mengenal teritorial. Meski demikian, dampak strategis dari gerakan baru ini dibatasi oleh minimnya sumber daya yang ada dalam wilayah domestik negara itu sendiri. Akan tetapi ini bukanlah kasus yang ada di Pakistan dan Afghanistan yang sekarang menjadi tempat lahirnya fundamentalisme Islam kontemporer. "Islamisme" adalah *brand* dari fundamentalisme politik Islam terkini yang mengklaim akan membentuk kembali masyarakat Islam yang sesungguhnya, tidak hanya dengan memberlakukan syariat, tetapi juga dengan mendirikan negara Islam melalui aksi politik. Kelompok Islam melihat Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi politik yang seharusnya diintegrasikan ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat (politik, hukum, ekonomi, keadilan sosial, kebijakan luar negeri, dan lain-lain).

Pikiran tradisional tentang Islam sebagai agama untuk semua umat diperlebar jangkauannya dalam masyarakat yang kompleks. Padahal mereka juga mengakui modernitas masyarakat dalam

bidang pendidikan, teknologi, perubahan dalam struktur keluarga dan lain sebagainya. Pendiri gerakan ini adalah Hassan Al-Banna (1906-1949), Abul A'la al-Maududi, dan dari kelompok Syiah adalah Baqer al Sadr, Ali Shariati dan Ruhullah Khomeini. Mereka memiliki pengaruh di kalangan pemuda yang

memiliki latar belakang sekuler termasuk perempuan. Mereka kurang berhasil memberikan pengaruh di kalangan ulama tradisional.

Bagi kalangan Islamis, negara Islam seharusnya menyatukan umat sebisa mungkin, tidak dibatasi oleh negara tertentu. Negara Islam ini berupaya untuk menciptakan kembali masa kejayaan Islam pada awal dekade perkembangan



Islam, yang berada di atas suku, etnis dan negara, yang perubahan drastisnya mengacu pada dihilangkannya hukum-hukum Islam atau pada kebijakan kolonial. Gerakan ini tidak selalu mengandung kekerasan meskipun secara definitif gerakan tersebut tidak demokratis: Jamaat Islami Pakistan dan Partai Refah Turki dan kebanyakan *Muslim Brothers* berada dalam *framework* legal, kecuali di wilayah di mana mereka dilarang mengambil aksi politik sebagaimana kasus yang terjadi di Syria misalnya.

Di negara di mana partai Islam banyak memberikan tantangan bukanlah

negara yang abstrak, tetapi lebih merupakan satu negara yang kurang lebih berakar pada sejarah dan merupakan bagian dari wilayah strategis. Partai-partai Islam itu sendiri merupakan produk masyarakat dan kultur politik yang sudah ada sebelumnya. Di balik klaim mereka bahwa negara Islam bersifat supranasional, kebanyakan gerakan Islam dibentuk oleh karakter nasional tertentu. Cepat atau lambat, mereka cenderung mengekspresikan kepentingan nasional, bahkan di bawah ideologi Islam sekalipun. Sebuah *survey* tentang gerakan Islam *mainstream* pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa mereka telah gagal dalam menghasilkan apapun yang menyerupai "Islam Internasional" bahkan ketika referensi ideologi mereka serupa sekalipun.

Nasionalisasi Islamisme ini tampak di kebanyakan negara di Timur Tengah. Hamas manantang PLO pimpinan Yaser Arafat tidak pada poin yang berhubungan dengan Islam, tetapi karena "mengkhianati" kepentingan nasional masyarakat Palestina. Turabi menggunakan Islam sebagai instrumen untuk menyatukan Sudan, dengan mengislamkan masyarakat Kristen dan pagan. Gerakan "Islah" di Yaman telah aktif dalam menyatukan kembali Yaman dan menentang keinginan Saudi Arabia. Gerakan Hizbullah di Libanon sekarang ini sedang menekankan pertahanan "bangsa Libanon" dan telah membangun jaringan dengan beberapa kelompok Kristen. Secara insidental, gerakan ini tidak lagi memegang ide untuk mendirikan negara Islam di Libanon dengan pertimbangan peran

umat Kristen dalam menentukan bangsa. Partai Refah di Turki, dengan menekankan garis keturunan Utsmani, sedang berupaya untuk menyatukan sejenis model neo-Utsmani Turki di Timur Tengah. Dengan cara yang sama Partai radikal Shi'i di Iraq, seperti Dawa', menekankan kebutuhan untuk menyatukan negara dan mereka bekerjasama dengan partai nasional non-Islam. FIS di Algeria mengklaim menjadi warisan NLF dari gerakan anti-Perang Prancis, dan tidak menemukan akar di Maroko atau Tunisia. Selama perang Gulf pada tahun 1991, setiap cabang organisasi *Mulism Brother* memosisikan diri sesuai dengan kepentingan nasional yang dipandang di negara masing-masing (contohnya cabang di Kuwait memperbolehkan intervensi militer Amerika Serikat dan cabang yang ada di Jordan sangat menolak intervensi tersebut).

Dalam wilayah domestik, partai-partai ini sebelumnya membawa eksklusivitas strata sosial ke dalam proses politik: partai Mustazaf di Iran (segmen populasi urban yang termarginalkan); kelompok Syiah di Libanon; penghuni kota terkini dan pendukung Refah; kelompok muda di wilayah urban di Algeria yang dikejutkan oleh kekerasan berdarah pada bulan Oktober 1988; suku-suku di wilayah Utara Yaman, dan lain-lain. Dalam menjalankan proses ini, mereka telah membantu untuk menanamkan ide negara bangsa dan menciptakan situasi politik di wilayah domestik, yang merupakan satu-satunya basis bagi proses demokratisasi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, partai-

partai Islam, meskipun mereka tidak demokratis, menekankan perlunya demokrasi, seperti jelas-jelas ada dalam kasus di Iran. Pemilihan Khatami menunjukkan adanya kebutuhan akan demokrasi yang mungkin hanya karena keseluruhan penduduk telah dibawa ke dalam situasi politik yang wajar oleh revolusi populer dan mengakar.

Karenanya, sekali proses ini dicapai, mainstream gerakan-gerakan Islam ketika mengkonsolidasikan konstituensi yang stabil di negara mereka sendiri, kehilangan pengaruhnya di luar batasan wilayah mereka. Partai Refah (sekarang Fazilat) tidak memiliki pengaruh di luar negeri kecuali di komunitas migran Turki di wilayah Eropa Barat, begitu juga dengan rezim Islam di Iran. Gerakan ini membuka gerakan yang lebih radikal yang mencoba

menghilangkan ide negara bangsa dan menginginkan untuk mendirikan kembali "ummah" atau komunitas muslim di seluruh dunia.

Seiring dengan berkembangnya pertarungan politik Islam pada tahun 70-an dan 80-an, proses Islamisasi konservatif telah tersebar di kalangan masyarakat Muslim, yang salah satunya berarti semakin banyaknya perempuan berjilbab di jalan-jalan dan lebih banyaknya Syariat Islam dalam hukum negara. Proses Islamisasi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan negara yang cukup fleksibel dan juga fenomena sosial. Dikonfrontasikan dengan oposisi Islam selama tahun 80-an, beberapa negara Muslim, meskipun secara official sekular, berupaya untuk mempromosikan Islam konservatif dan mengorganisir negara Islam secara ofisial. Bagian



pertama dari proses ini telah cukup berhasil, tetapi kontrol negara tidak pernah efektif. Di semua negara ini, dampak perkembangan jaringan sekolah-sekolah agama terlihat sama; lulusan dari jurusan ilmu-ilmu agama sekarang ini memasuki dunia pasar kerja dan tentu saja cenderung mengadvokasi Islamisasi pendidikan dan undang-undang untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik.

Beberapa elemen menjadi karakter kelompok-kelompok ini (banyak dianut oleh koalisi Taliban/Osama bin Laden). *Pertama*, mereka mengkombinasikan jihad politik dan militan untuk melawan Barat dengan definisi Islam yang sangat konservatif, lebih menyerupai Wahabisme di Saudi Arabia daripada ideologi ofisial Republik Islam Iran. Konservatisme mereka lebih tampak dalam sikap mereka terhadap perempuan. Meskipun kelompok Islam mengadvokasi pendidikan dan partisipasi politik perempuan dengan kuat (dengan syarat memakai jilbab dan pergi ke sekolah *single-sex*), gerakan neo-fundamentalisme ingin melarang perempuan mana pun tampak di dunia publik. Mereka menentang sangat keras terhadap musik, seni, dan hiburan.

Bertentangan dengan kelompok Islam, mereka tidak memiliki agenda ekonomi dan sosial. Mereka adalah warisan dari tradisi konservatif Sunni yang terobsesi oleh bahaya hilangnya kemurnian Islam karena adanya pengaruh agama lain. Mereka menekankan implementasi syariat sebagai kriteria utama negara dan masyarakat Islam. Sunnisme juga menjadi

sangat anti-Syiah. Bias anti Syiah dihidupkan kembali pada akhir tahun 1980-an sebagai konsekuensi bekembangnya pengaruh Wahabisme Saudi dan telah memberi jalan bagi rendahnya intensitas perang sipil antara Syiah dan Sunni di Pakistan, yang terefleksikan di Afghanistan dengan pembunuhan massal kaum Syiah setelah pengambilalihan kekuasaan Mazar-i Sharif oleh Taliban pada bulan Agustus 1998. Tetapi mereka kemudian juga menjadi sangat anti-Kristen dan Yahudi. Padahal mereka percaya bahwa Israel, Amerika Serikat, dan Iran disatukan untuk menghancurkan Islam yang sebenarnya.

Walaupun slogan anti penjajahan adalah hal yang umum di kalangan gerakan Islam sejak tahun 50-an dan seterusnya, dan politik anti-Zionisme berkembang menjadi Semitisme beberapa tahun yang lalu di kalangan beberapa intelektual Muslim (tidak semuanya religius), propaganda anti-Kristen di kalangan gerakan "Sunni Baru" relatif masih baru. Kelompok Islam dulu tidak anti Kristen seperti kelompok Islam sekarang ini; di Iran selama masa Revolusi tidak pernah ada serangan terhadap gereja. *Muslim Brothers* di Iran tidak pernah menghancurkan Copt (salah satu keturunan langsung nenek moyang Mesir). Idenya adalah adanya latarbelakang yang sama di antara mereka. Akan tetapi, sekarang ini term "perang agama" betul-betul menjadi perhatian.

Kedua, gerakan-gerakan ini bersifat supra-nasional. Melihat pada sejumlah pengikut Osama bin Laden yang terbunuh

atau tertangkap antara tahun 1993-2001 menunjukkan bahwa mereka umumnya tidak mengakar di daerah asal mereka, berpendidikan di Barat, memiliki masalah dengan keluarga dan negara asal mereka. Mereka hidup dalam dunia yang global. Tentu saja jaringan supra-nasional kadang-kadang menjadi mungkin karena ada jaringan infra-nasional, seperti suku Pashtun yang menjadi basis Taliban, pemimpin Jamaat Islam Pakistan (Qozi Husseyn), pimpinan satu cabang Ulama Jamiat (Senator Samiul Haqq, dari Akora Khattak), dan beberapa orang lain yang tergabung dalam ISI (Kolonel Imad yang menjadi konsultan Taliban).

Meskipun kelompok Islam betul-betul mengadaptasi negara bangsa, gerakan neo-fundamentalis justru memunculkan krisis negara bangsa, berada di antara solidaritas infra-negara dan globalisasi. Level negara dilewati begitu saja dan diabaikan. Taliban tidak mempedulikan negara. Bahkan, mereka merendahkan masyarakat Afghanistan dengan mengubah denominasi ofisial negara dari "negara Islam" menjadi "Emirat". Mollah Omar tidak peduli untuk menghadiri pertemuan menteri atau pergi ke Ibu kota.

Pada kenyataannya, gerakan neo-fundamentalisme supra-nasional ini lebih

merupakan produk globalisasi kontemporer daripada sejarah Islam di masa lampau. Dengan menggunakan dua bahasa Internasional (Inggris dan Arab), bepergian dengan pesawat dengan mudah, belajar, *training*, dan bekerja di beberapa negara berbeda, berkomunikasi melalui internet dan *handphone*, mereka mewakili diri mereka sebagai "muslim" dan bukan sebagai warga negara dari negara tertentu. Mereka seringkali tidak mengakar pada negara mereka (banyak di antara mereka yang menjadi pengungsi Palestina sejak tahun 1948, dan bukan dari Gaza atau West Bank; bin Laden dicabut kewarganegaraannya di Saudi; beberapa yang lain menjadi bagian dari keluarga migran yang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan atau pendidikan). Ini mungkin merupakan paradoks globalisasi untuk bergerak menuju jaringan supra-nasional dan bentuk relasi infra-negara tradisional dan bahkan kuno (tribalisme misalnya, atau jaringan sekolah-sekolah agama). Bahkan, bentuk kepercayaan dan perilaku agama yang sangat sektarian sekalipun membuat gerakan neo-fundamentalis terlihat seperti sekte lain yang tersebar di seluruh planet. ❖

FUNDAMENTALISME ISLAM = ISLAM POLITIK

Selain tidak memberikan makna apa-apa, fundamentalisme Islam lebih merupakan teori politik ketimbang teologi dan praktik sosial. Karena itu, tidak heran bila bagi sebagian kalangan, fundamentalisme Islam merupakan sebuah fenomena yang mengancam tatanan dunia. Kaum fundamentalis disinyalir mempunyai agenda politisasi Islam dalam pengertian bahwa mereka telah menjadikan Islam sebagai ideologi politik.

Ditinjau dari proses kelahirannya, fundamentalisme Islam memang merupakan reaksi terhadap krisis berganti-ganti dari berbagai ideologi dan –karenanya– ia merupakan gerakan yang mencoba menawarkan solusi berupa Islam sebagai sebuah ideologi alternatif. Betapa pun demikian, jika ditelaah lebih jauh, mereka sendiri tidak memiliki ide yang jelas mengenai bagaimana sesungguhnya solusi yang ditawarkan itu. Pada sisi yang lain, cita-cita fundamentalisme Islam untuk membangun suatu sistem sosial-politik berdasarkan syariat tidak mungkin terwujud di zaman modern karena minimnya dukungan dari umat Islam sendiri.

Demikianlah pokok-pokok pemikiran yang dilontarkan Prof. Dr. Bassam Tibi, Guru Besar Hubungan Internasional Gottingen University, Jerman; dan Prof. Dr. Mahmoud Ayyub, Guru Besar Kajian Islam Temple University dan dosen tamu di Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk studi Perbandingan Agama dalam sebuah kesempatan wawancara dengan **Abdurrahman Kasdi**, **Khamami Zada** dan **Mujiburrahman** dari Jurnal Tashwirul Afkar. Wawancara dilakukan dalam dua bahasa (Arab dan Inggris) dan berlangsung di Inter-Continental Hotel, Jakarta, pertengahan bulan September 2002. Berikut ini terjemahan dari wawancara tersebut.